

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

(Studi Kasus Pada Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan
Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu)



OLEH

YULINA ARIKA
NIM : 10675005133

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010**

S K R I P S I

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

(Studi Kasus Pada Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan
Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu)

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial dari
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

YULINA ARIKA
NIM : 10675005133

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2 0 1 0**

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

(Studi Kasus Pada Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan
Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu)

ABSTRAK
Oleh
YULINA ARIKA

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP), sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Selain itu, program ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengentaskan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Khususnya Program Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, karena sudah 3 tahun program ini dijalankan belum memperlihatkan hasil yang sangat signifikan.

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka populasi penelitian ini adalah anggota simpan pinjam Desa Batu Gajah. Berpegang pada prinsip rasionalitas dan untuk mendukung validitas hasil penelitian ini, maka ditetapkan sampel 36 orang keseluruhan dari populasi, dengan menggunakan teknik sensus. Data yang digunakan yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber dan informan melalui observasi, kuesioner, serta wawancara. Kemudian data sekunder yakni data yang sudah diolah dalam bentuk naskah dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Simpan Pinjam di Desa Batu Gajah kebanyakan (43,82%) sudah sesuai dengan Keputusan Menkokesra Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, walaupun begitu ada responden yang menilai sangat sesuai (22,37%), yang menilai cukup sesuai sebanyak (18,67%), namun ada juga responden (13,42%) menilai masih kurang sesuai, bahkan ada responden (1,69%) yang belum sesuai sama sekali.

Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka pemerintah harus lebih menyederhanakan lagi persyaratan yang dibuat agar masyarakat yang menjadi sasaran utama program ini bisa melakukan pinjaman dan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang dipinjamkan maka pelatihan, pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana harus lebih ditingkatkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	iv
DAFTAR TABEL -----	vi
DAFTAR GAMBAR-----	ix
BAB I PENDAHULUAN-----	1
I.1. Latar Belakang Masalah -----	1
I.2. Perumusan Masalah -----	11
I.3. Tujuan Penelitian -----	11
I.4. Manfaat Penelitian -----	11
I.5. Sistematika Penulisan -----	12
BAB II TELAAH PUSTAKA -----	14
II.1. Teori -----	14
II.1.1. Pengertian Pemberdayaan-----	14
II.1.2. Pengertian Pembangunan -----	17
II.1.3. Pengertian Kebijakan Publik -----	19
II.2. Hipotesis -----	31
II.3. Defenisi Konsep-----	32
II.4. Variabel Penelitian-----	33
II.6. Konsep Operasional -----	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN-----	38
III.1. Lokasi dan Waktu Penelitian-----	38
III.2. Jenis Dan Sumber Data -----	38
III.3. Populasi dan Sampel -----	38
III.4. Metode Pengumpulan Data-----	39
III.5. Analisa Data -----	39
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN-----	40
IV.1. Gambaran Umum Kecamatan Pasir Penyu-----	40
IV.2. Gambaran Umum Desa Batu Gajah-----	41

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	51
V.1.	Identitas Responden -----	51
V.2.	Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Batu Gajah -----	54
V.2.1.	Tujuan Program -----	55
V.2.2.	Ketentuan Dasar -----	65
V.2.3.	Ketentuan Pendanaan -----	74
V.3.	Rekapitulasi Tanggapan responden tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Batu Gajah -----	84
 BAB VI	 KESIMPULAN DAN SARAN -----	 89
VI.1.	Kesimpulan -----	89
VI.2.	Saran-Saran -----	90
Daftar pustaka		
Lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Strategi pemerintah pusat dewasa ini menjadikan desa sebagai sasaran pembangunan utama, merupakan suatu strategi yang sangat tepat, karena mayoritas masyarakat Indonesia hidup di daerah perdesaan, ini berarti jika tingkat perekonomian masyarakat di daerah perdesaan baik, maka secara keseluruhan tingkat perekonomian Indonesia juga baik.

Seperti yang kita ketahui bahwa hakekat dari Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sudah menjadi cita-cita nasional untuk lebih meratakan pembagian hasil pembangunan yang telah maupun yang akan dicapai.

Maka akan terjadi permasalahan yang kompleks jika pembangunan di daerah perdesaan tidak diperhatikan secara serius, salah satunya adalah terjadinya arus urbanisasi yang selama ini menjadi persoalan serius di daerah perkotaan dan di Indonesia secara umum. Dengan adanya arus urbanisasi yang besar dari daerah perdesaan, maka berbagai masalah akan timbul dan menjadi persoalan yang serius. Diantara masalah-masalah yang selama ini terjadi akibat urbanisasi adalah tingginya angka pengangguran, tingginya tingkat kriminalitas, dan persoalan-persoalan yang ada disekitarnya berkaitan dengan ketidakmampuan secara ekonomi.

Kemiskinan dan pengangguran menjadi persoalan bangsa kita hingga saat ini. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Masalah kemiskinan ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu dituntut peran pemerintah agar lebih aktif dalam memberikan perhatiannya dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007, mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat

miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Tujuan umum dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan seluruh partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)
- g. Mengembangkan kerja sama antar kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.(PTO PNPM Mandiri Perdesaan : 3)

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pelebagaan sistem pembangunan partisipatif, pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, dan pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat diklasifikasikan atas 5 jenis kegiatan yang meliputi:

- 1) Kegiatan pendidikan masyarakat,
- 2) Kegiatan kesehatan masyarakat,
- 3) Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP),
- 4) Kegiatan sarana dan prasarana sosial ekonomi,
- 5) Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi.

Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan.

Sumber dana PNPM Mandiri perdesaan berasal dari: APBN, APBD, swadaya masyarakat, dan partisipasi dunia usaha.

Dasar dari pengelolaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan adalah :

- a. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.

- b. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- c. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- d. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktifitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- e. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Kelompok yang berhak menerima dana SPP adalah kelompok yang:

- a. Beranggotakan perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun.
- b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan.

- d. Kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik.
- e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
- f. Penyaluran dana BLM tidak diperkenankan adanya syarat agunan kepada kelompok.
- g. Kompetisi kelompok SPP lebih mempertimbangkan kelayakan kelompok pengusul. Jika desa mengusulkan lebih dari satu kelompok maka hanya kelompok yang usahanya layak yang dapat didanai.
- h. Pengembalian dari dana SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP, baik kelompok lama (pernah menerima pendanaan SPP sebelumnya) ataupun kelompok baru yang sesuai ketentuan pengelolaan dana bergulir.

Anggota SPP juga memiliki usaha yang berbeda-beda sebagaimana dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 : Jenis Usaha Yang Mendapat Bantuan Dana Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP)

No	Jenis Usaha	Jumlah (Orang)	Jumlah Dana
1	Perdagangan	15	Rp 109.000.000
2	Peternakan	7	Rp 32.000.000
3	Industri kecil	7	Rp 42.000.000
4	Jasa	7	Rp 51.000.000
	Jumlah	36	Rp 234.000.00

Sumber : UPK Pasir Penyu, 2009

Menurut tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa jenis usaha Perdagangan merupakan jenis usaha yang paling banyak dimiliki anggota yaitu 15 orang. Sedangkan jenis usaha Peternakan, jasa dan Industri Kecil adalah jenis usaha yang paling sedikit yaitu hanya ada 7 orang pada tiap-tiap jenis usaha yang bersangkutan.

Setiap perguliran dana diwajibkan bagi masing-masing kelompok untuk membuat proposal permohonan untuk perguliran dana PNPM Mandiri ini, dimana didalam proposal tersebut harus dilampirkan beberapa hal yang antara lain:

- 1) Surat permohonan yang ditujukan kepada PJOK
- 2) Surat usulan kegiatan ekonomi
- 3) Surat permohonan kredit
- 4) Surat perjanjian kredit
- 5) Daftar anggota kelompok
- 6) Surat pernyataan tanggung renteng
- 7) Administrasi kelompok
- 8) Identitas anggota, yang terdiri dari Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Usaha dari Desa
- 9) Surat kuasa
- 10) Surat pernyataan sanggup mengembalikan tanpa tunggakan
- 11) Surat pernyataan jaminan anggota kelompok

Pelaksanaan kegiatan SPP yang berlokasi di Desa Batu Gajah, masih mengalami beberapa kendala, seperti masih adanya anggota yang menunggak. Sebagaimana terlihat dalam tabel I.2 di bawah ini:

Tabel I.2 : Daftar Nama-Nama Anggota SPP Desa Batu Gajah Yang Menunggak

No	Nama Pemanfaat	Tunggakan	Keterangan
1	Yasnah	497.000	Jatuh tempo
2	Sarmini	274.000	Jatuh tempo
3	Suharti	829.000	Jatuh tempo
4	Waginem	995.000	Jatuh tempo
TOTAL		2.595.000.	

Sumber : UPK Pasir Penyu, 2009

Menurut tabel I.2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah peminjam yang menunggak dan jatuh tempo angsuran pengembalian pinjaman ada 4 orang. Keadaan yang demikian bisa menimbulkan kredit macet, sehingga menjadi masalah dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) karena dapat menimbulkan kerugian terhadap simpan pinjam tersebut. Selain itu, akibat yang paling dirasakan akibat kredit macet diatas adalah ketidak pastian pencairan dana bagi yang berada pada daftar tunggu, karena dana yang akan diberikan kepada mereka adalah dana yang bersumber dari pengembalian pinjaman oleh pemanfaat.

Selain permasalahan diatas, ada juga kelompok yang tidak lagi mendapatkan dana pinjaman dari simpan pinjam ini, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 : Daftar Nama Kelompok yang Menerima Dana SPP di Desa Batu Gajah Tahun 2008 dan Tahun 2009.

No	Nama Kelompok	Tahun 2008	Tahun 2009
1	Anggrek	Rp. 19.000.000	-
2	Belimbing	Rp. 31.000.000	Rp. 56.000.000
3	Kamboja	-	Rp. 46.000.000
4	Maju usaha sepakat	Rp. 21.000.000	Rp. 59.000.000
5	Mawar	Rp. 36.000.000	Rp. 78.000.000

Sumber: UPK Kecamatan Pasir Penyu, 2009.

Dari uraian tabel I.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pinjaman yang diterima tiap kelompok dari tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami peningkatan. Namun untuk kelompok Anggrek tahun 2009 ini tidak lagi mendapat pinjaman karena kelompok ini tidak bisa membayar pinjaman tepat pada waktu yang telah ditentukan, dimana kelompok ini menunggak untuk pembayarannya. Sedangkan untuk kelompok kemboja mulai tahun 2009 mendapat pinjaman. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa jika ada salah satu kelompok yang menunggak untuk pembayaran pinjaman tiap bulannya, akan berpengaruh pada pinjaman tahun berikutnya bahkan bisa tidak menerima dana pinjaman lagi dan ini tentu merugikan orang-orang yang ada didalam kelompoknya juga bagi kelompok lain yang menjadi daftar tunggu .

Berdasarkan hasil prasurvey penulis dilapangan permasalahan yang terjadi adalah

1. Menurut peminjam, persyaratan pinjaman yang mewajibkan adanya agunan/jaminan bagi pemohon dan persyaratan lainnnya, menyulitkan masyarakat miskin yang ingin mengajukan permohonan, karena ketidakmampuan dan ketidakpahaman mereka.
2. Masih minimnya informasi tentang SPP di Desa batu Gajah, sehingga masyarakat merasa kesulitan mencari informasi yang berkenaan dengan SPP tersebut.

3. Anggota kelompok yang masuk daftar tunggu terkadang harus menunggu lama sekali untuk mendapat giliran pencairan dana, akibat dari adanya kelompok yang menunggak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Program Pemerintah ini, untuk itu penulis mengangkat judul :”***Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Pada Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)***”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah *Apakah Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Pada Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan) Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Sudah Sesuai Dengan Keputusan Menkokesra No.25 Tahun 2007.*

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Khususnya Kegiatan Simpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Sebagai masukan serta informasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program pemberdayaan masyarakat.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.

I.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini seperti teori Kebijakan Publik, pembangunan, teori Pemberdayaan Masyarakat dan penjelasan PNPM Mandiri, juga berisi hipotesis, variabel penelitian, definisi konsep dan konsep operasional.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang metodologi penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari gambaran umum Desa Batu Gajah yang meliputi : Sejarah Desa Batu Gajah, Letak Geografis Desa Batu Gajah, Monografi Desa Batu Gajah.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari identitas responden, tanggapan responden terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri khususnya kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1. Kerangka Teori

Untuk memperjelas konsep penelitian ini, maka penulis merangkai beberapa pendapat dan teori sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

II.1.1. Pemberdayaan

Menurut Suharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/kelompok yang diberdayakan.

Menurut Eko (2004:11) pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan insitusi semacam lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat dan bebas kebodohan, kelaparan, dan kemiskinan.
2. Menjangkau sumber produktif yang mungkin mereka dapat untuk meningkatkan pendapatannya.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi (Suharto, 2006:59)

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek, sehingga diharapkan dapat mampu menciptakan masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat.

Menurut Zubaedi (2007:18) mengemukakan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan efektif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Lebih lanjut Zubaedi menjelaskan pengembangan masyarakat sering kali di implementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan:

“*Pertama*, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak lain yang bertanggung jawab (*Ibid*, 19).’

Menurut Suharto (2006:61) peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi harus menganut beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*)
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (*accountable*)
3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*)
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainable*)
5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Program pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan bantuan dana harus mengandung unsur-unsur yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program tersebut harus bisa mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatannya secara ekonomis, bukannya konsumtif.

II.1.2. Pembangunan

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan sering dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Menurut Siagian (2005:142) pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Maka tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan.

Menurut Budiman (2000:2) ada beberapa cara untuk mengukur berhasil atau tidaknya pembangunan yaitu dengan mengukur : Kekayaan rata-rata, Pemerataan, Kualitas kehidupan, Kerusakan lingkungan, Keadilan sosial dan kesinambungan. Dengan mengetahui ke lima hal diatas nantinya kita akan dapat mengetahui apakah pembangunan itu berhasil dengan baik atau tidak.

Program yang dibuat untuk memberdayakan masyarakat, terlaksana apabila masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut. Sebagaimana dikatakan Wahyudi Sumpeno (dalam Mudiyo Dkk, 2005:115-116) memberikan penegasan pentingnya

partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat agar pembangunan itu lebih memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat dan lebih terarah pada tujuan pengembangan masyarakat itu sendiri, yang ia ungkapkan sebagai berikut:

1. Pembangunan sumberdaya manusia tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun dari pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumberdaya pendukung lebih banyak dimiliki individu, kelompok, atau organisasi masyarakat.
2. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program dengan baik termasuk dalam tujuan, pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman dalam menggunakan teknologi untuk kepentingan bersama.
3. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerja bersama dalam program-program pembangunan manakala mereka ikut bertanggung jawab di dalamnya.
4. Dalam kehidupan demokratis secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan dan harapan yang ingin dicapainya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannya. Disamping itu masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut.

Maka, dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses

pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang dimiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia.

II.1.3. Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai salah satu instrumen dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah.

Banyak sekali definisi-definisi tentang kebijakan itu sendiri yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

Menurut Tangkilisan (2008:3), kebijakan dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Menurut Suharto (2008:3), kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan/seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang mengandung nilai tertentu, memuat

ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya (LAN, 2005:106).

Menghadapi masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat mengganggu dan merusak tatanan sosial (seperti kenakalan remaja).

Sedangkan Menurut Nugroho (2009:85) bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Dari sudut sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, kebijakan publik berlangsung pada tatanan organisasi pemerintahan diseluruh wilayah Negara. Disamping itu, kebijakan publik terkait erat dengan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia (ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan) yang sangat kompleks dan dinamis. Kebijakan publik sebagai keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara meliputi:

- 1 Merupakan kebijakan yang berupa pilihan bagi pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

2 Bertujuan menghadapi situasi atau permasalahan tertentu yang bermakna “ demi kepentingan publik, dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, aman, dan sejahtera;

3 Memandu penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah;

4 Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, yang dikeluarkan oleh lembaga Negara yang berwenang (LAN, 2005:106).

Dari beberapa pengertian dan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan negara. Kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Secara sederhana bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Peraturan pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.
3. Kebijakan publik bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota (Nugroho, 2009:92).

Proses kebijakan publik dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak tiga kelompok tahapan kegiatan utama, yaitu:

1. Pembuatan atau perumusan kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen perencanaan), yang meliputi;
 - 1) Penyusunan agenda kebijakan;
 - 2) Perumusan kebijakan.
2. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen: pelaksanaan/*actuating*); dan

3. Evaluasi kinerja kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen: *controlling*), yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan (internal dan eksternal) dan pertanggungjawaban/akuntabilitas (Nugroho, 2004:123).

Dengan evaluasi ini dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaiannya dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi dan menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Evaluasi mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggung jawabkan secara metodologi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup Rumusan, Implementasi, Lingkungan dan kinerja kebijakan.

Dengan melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditunjukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Menurut Suchman (dalam Nugroho, 2009: 541) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan lima langkah dalam mengevaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah salah satu wujud nyata dari pemberdayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah sehingga diharapkan masyarakat dapat merubah kehidupan ekonomi dan pola pikir mereka dengan adanya program tersebut.

PNPM Mandiri ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, dimana kebijakan ini menyangkut khalayak ramai yang sering juga disebut dengan kebijakan publik.

Manajemen kebijakan publik merupakan keseluruhan proses pengelolaan kebijakan dalam berbagai tahapannya (formulasi, implementasi, dan evaluasi) termasuk unsur / aspek yang terdapat dalam setiap tahapan (teknis, substansi, pelaku, dan kelembagaannya), agar mampu mengaktualisasikan nilai dan prinsip

pemerintahan yang baik (*good governance*). Proses kebijakan publik tersebut berlangsung dalam sistem administrasi Negara, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa.

Sesuai dengan pedoman umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- b. Otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
- c. Desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.

- e. Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
- g. Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- h. Transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
- i. Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
- j. Keberlanjutan adalah dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

(PTO PNPM Mandiri Perdesaan : 3)

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dapat diklasifikasikan atas 5 jenis kegiatan yang meliputi:

1. Kegiatan pendidikan masyarakat
2. Kegiatan kesehatan masyarakat
3. Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP)
4. Kegiatan sarana dan prasarana sosial ekonomi
5. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai oleh melalui PNPM Mandiri perdesaan adalah sebagai berikut:

1. pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik.
2. pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah
3. pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbestos dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain)
4. pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya
5. pembiayaan gaji pegawai negeri
6. pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia kerja

7. kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau
8. kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut
9. kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang
10. kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju Negara lain
11. kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai
12. kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 (Ha)
13. pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha
14. kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Sanksi dapat berupa:

- a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.
- b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan.
- c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri perdesaan dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman.

Sumber dana PNPM Mandiri perdesaan berasal dari: APBN, APBD, swadaya masyarakat, dan partisipasi dunia usaha.

Pengelolaan dana bergulir dalam PNPM Mandiri pada hakekatnya dipengaruhi oleh 3 hal yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dan penyalur seluruh dana bergulir ditingkat kecamatan, kelompok peminjam sebagai pengelola dan penyalur dana bergulir kepada anggota sebagai pemanfaat langsung

serta aturan dan prosedur/ mekanisme perguliran. Selain itu, forum Musyawarah Antar Desa sebagai forum yang mempunyai wewenang untuk menetapkan beberapa keputusan mengenai perguliran seperti aturan dan prosedur perguliran harus difasilitasi dengan baik sehingga setiap keputusannya mendukung pelestarian dan pengembangan dana bergulir.

Begitu juga kelompok peminjam sebagai penyalur peminjam kepada anggota atau individu pemanfaat. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir diarahkan melalui upaya penguatan kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Peminjam dengan cara:

1. Pembuatan aturan-aturan dan prosedur / mekanisme perguliran,
2. Penguatan kapasitas pengurus UPK dan kelompok dalam kegiatan pengelolaan keuangan dan pinjaman,
3. Penguatan Unit Pengelola Kegiatan dan kelompok secara kelembagaan,
4. Pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak lain.

Kelompok Peminjam adalah kelompok yang menunggak dana bergulir PNPM Mandiri. Untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir, kelompok peminjam harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam PNPM Mandiri.

Jenis kelompok peminjam yang ada dalam PNPM Mandiri selama ini dapat digolongkan menjadi 3 jenis kelompok yaitu:

1. Kelompok Simpan Pinjam adalah kelompok yang mengelola simpanan (tabungan) anggota dan pinjaman dengan tujuan peningkatan kesejahteraan anggota.
2. Kelompok Usaha Bersama adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha sejenis yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok.
3. Kelompok Aneka Usaha adalah kelompok yang anggotanya mempunyai usaha bermacam-macam.

II.2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiono, 2005:70). Maka Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan sebelumnya, dapat diambil suatu hipotesa sesuai dengan masalah yang dihadapi sebagai jawaban sementara yaitu ***“Diduga Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri – Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Kurang Sesuai Dengan Keputusan Menkokesra Nomor 25 Tahun 2007”*** disebabkan:

1. Masih banyaknya jumlah peminjam yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran dana bagi yang ada pada daftar tunggu.

2. Sulitnya pemohon untuk melengkapi persyaratan pinjaman, seperti adanya agunan dan proposal permohonan.

II.3. Defenisi Konsep

Untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

- a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah salah satu wujud nyata dari pemberdayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah sehingga diharapkan masyarakat dapat merubah kehidupan ekonomi dan pola pikir mereka dengan adanya program tersebut.
- b. Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) dalam Penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.
- c. Pemberdayaan adalah pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat miskin di pedesaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

- d. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.
- e. pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern.
- f. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

II.4. Variabel Penelitian

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2005:38).

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah “Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Khususnya Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP).

Indikator yang dijadikan penilaian berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 25 Tahun 2007 pada Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri yang berupa:

1. Tujuan program

- 1) Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan
- 2) Kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro
- 3) Mengurangi rumah tangga miskin
- 4) Meningkatkan perekonomian
- 5) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam
- 6) Menciptakan lapangan kerja bagi kaum perempuan

2. Ketentuan Dasar

- 1) Kemudahan, mendapatkan pelayanan pendanaan tanpa syarat agunan
- 2) Terlembagakan, mempunyai tata cara dan prosedur yang baku
- 3) Keberdayaan, proses pengelolaannya didasari keputusan yang professional
- 4) Pengembangan, berorientasi pada peningkatan pendapatan
- 5) Akuntabilitas, pengelolaan dananya dapat dipertanggung jawabkan
- 6) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan

3. Ketentuan pendanaan

- 1) Sasaran program yaitu rumah tangga miskin yang produktif
- 2) Memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal
- 3) Beranggotakan kaum perempuan
- 4) Memiliki organisasi kelompok dan administrasi
- 5) Memiliki aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman
- 6) Saling mengenal satu sama lain

II.5. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional variabel dari Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri khususnya kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Program yaitu:

- 1) Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, 2) Kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, 3) Mengurangi rumah tangga miskin, 4) Meningkatkan perekonomian, 5) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam, 6) Menciptakan lapangan kerja bagi kaum perempuan

Dengan pengukuran:

Sangat Sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai tujuan dari program SPP sangat sesuai.

Sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai tujuan dari program SPP sesuai.

Cukup sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai tujuan dari program SPP cukup sesuai.

Kurang sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai tujuan dari program SPP kurang sesuai.

Belum sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai tujuan dari program SPP belum sesuai.

2. Ketentuan Dasar yaitu:

- 1) kemudahan, masyarakat miskin dengan mudah mendapatkan pelayanan pendanaan tanpa syarat agunan
- 2) terlembagakan, kelompok SPP ini mempunyai tata cara dan prosedur yang baku
- 3) keberdayaan, proses pengelolaan harus didasari keputusan yang professional
- 4) pengembangan, berorientasi pada peningkatan pendapatan
- 5) akuntabilitas, pengelolaan dana harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat,
- 6) meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan pengukuran:

Sangat Sesuai : Apabila kebanyakan dari responden menilai ketentuan dasar dari SPP sangat sesuai.

Sesuai : Apabila kebanyakan dari responden menilai ketentuan dasar dari SPP sesuai.

Cukup sesuai : Apabila kebanyakan dari responden menilai ketentuan dasar dari SPP cukup sesuai.

Kurang sesuai : Apabila kebanyakan dari responden menilai ketentuan dasar dari SPP Kurang sesuai.

Belum sesuai : Apabila kebanyakan dari responden menilai ketentuan dasar dari SPP belum sesuai.

3. ketentuan Pendanaan yaitu:

1) Sasaran program yaitu rumah tangga miskin yang produktif, 2) Memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal, 3) Beranggotakan kaum perempuan, 4) Memiliki organisasi kelompok dan administrasi, 5) Memiliki aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman, 6) Saling mengenal satu sama lain.

Sangat Sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai ketentuan pendanaan sangat sesuai.

Sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai ketentuan pendanaan sesuai.

Cukup sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai ketentuan pendanaan cukup sesuai.

Kurang sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai ketentuan pendanaan kurang sesuai.

Belum sesuai : Apabila kebanyakan responden menilai ketentuan pendanaan belum sesuai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, tentang Pelaksanaan PNPM Mandiri Studi Pada Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Adapun waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Januari-Maret 2010.

III.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data pokok yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Dimana data sekunder ini merupakan data pendukung dalam penelitian ini.

III.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2005:90). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (*Ibid*, 91). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota SPP Desa Batu Gajah yang berjumlah 36 orang dan yang dijadikan sampel adalah keseluruhan dari populasi dengan menggunakan teknik sensus karena mengingat sampel yang dijadikan responden jumlahnya sedikit dan berada dalam suatu tempat atau lokasi.

III.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Yaitu salah satu metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden.

2. Kuesioner atau Angket

Kuesioner yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian kepada responden.

3. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang langsung melakukan pengamatan ke lapangan untuk mendapat data yang berhubungan dengan penelitian.

III.5. Analisa Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun dan di hubungkan dengan teori-teori yang relevan dengan masalah kemudian diambil suatu kesimpula

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.1. Gambaran Umum Kecamatan Pasir Penyu

Kecamatan Pasir Penyu memiliki luas daerah sebesar 372,50 Km² (4.54 % dari luas Kabupaten Indragiri Hulu) yang terdiri dari 28 Desa/Kelurahan yaitu Pasir Bangkal, Morong, Pasir Kelampaian, Kuala Lala, Pasir. Batu Mandi, Pasir Selabau, Pasir Keranji, Air Molek I, Candi Rejo, Air Molek, Lembah Dusun Gading, Petalongan, Kembang Harum, Batu Gajah, Jati Rejo, Kelawat, Sungai Lala, Perkempungan. Sungai Lala, Rimpian, Pondok Gelugur, Sei Beras Hilir, Kulim Jaya, Sei Beras-beras, Tasik Juang, Pointian Mekar, Air Putih, Lubuk. Batu Tinggal, Perkampungan. Sungai Parit.

Batas Wilayah dilihat dari kondisi geografis adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kelayang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rengat Barat
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberida

Jumlah penduduk Kecamatan Pasir Penyu yaitu 50.198 jiwa (17,9 % dari Kabupaten Indragiri Hulu), dengan komposisi jumlah rumah tangga 11.180. Adapun jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat kita lihat pada tabel IV.1 dibawah ini

Tabel IV.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Pasir Penyu Menurut Jenis Kelamin.

No	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		Jumlah
	1	2	
	Laki-Laki	Perempuan	
1	25.412	24.786	50.198

Sumber : *Kecamatan Pasir Penyu, 2009.*

Dari tabel IV.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, dimana laki-laki berjumlah 25.412 orang sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan 24.786 orang.

IV.2. Gambaran Umum Desa Batu Gajah

IV.2.1. Sejarah Desa Batu Gajah

Banyak yang tidak mengetahui mengapa desa tersebut dinamakan batu gajah, tetapi mitos yang berkembang di masyarakat adalah bahwa pada jaman dahulu terjadi suatu kisah tentang seorang kakek yang berbuat negative terhadap seorang cucunya, kemudian ada seekor gajah yang mengamuk dan membunuh kakek dan cucunya tersebut yang kemudian menjelma menjadi seongkah batu yang besar. Batu tersebut hingga saat ini masih terdapat di desa tersebut, tetapi tidak satupun masyarakat yang mampu mengangkat batu tersebut berkaitan dengan kisah mistis yang menyelubunginya.

Tetapi cerita diatas tadi tidak dapat dijadikan suatu patokan penamaan batu gajah itu sendiri, yang pasti adalah bahwa desa batu gajah secara administrasi terbentuk sejak tahun 1940 dan hingga saat ini sudah terjadi 8 kali pergantian

penghulu atau kepala desa. Dan masa periode kepemimpinan mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 1940 s/d 1952 : Penghulu Sumardi Sonto Prawiro
- 2) Tahun 1952 s/d 1959 : Penghulu Kusmin
- 3) Tahun 1959 s/d 1966 : Penghulu Toha
- 4) Tahun 1966 s/d 1999 : Penghulu Abdul Kadir Hamid
- 5) Tahun 1999 s/d 2000 : PLT Kepala Desa M. Yunan Sm. Hk
- 6) Tahun 2000 s/d 2005 : Kepala Desa Fackhrudin Syam
- 7) Tahun 2005 s/d 2006 : PJS Kepala Desa Drs. Moh. Solkan
- 8) Tahun 2006 s/d sekarang : Kepala Desa M Ali Khairul

IV.2.2. Letak Geografis Desa Batu Gajah

Desa Batu Gajah berada di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu yang mempunyai luas wilayah 2 (dua) KM² yang terdiri dari 4 Rukun Warga dan 12 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 2.520 jiwa yang terdiri dari 530 Kepala Keluarga (KK).

Keadaan topografi Desa Batu Gajah sebagian besar merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi tanah dari permukaan laut yaitu 32 M. Pada umumnya Desa Batu Gajah beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 19,5°C sampai 34,2°C.

Adapun batas-batas wilayah dari Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus yaitu:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Candirejo.

2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Pasir Keranji.
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Jati Rejo.
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Air Molek I.

IV.2.3. Monografi Desa Batu Gajah

IV.2.3.1. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Bila dilihat dari tingkat umur penduduk di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu, maka dapat dibagi kepada lima tingkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.2 di bawah ini.

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur Di Desa Batu Gajah

No	Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Umur					Jumlah
	1	2	3	4	5	
	0-5	6-16	17-25	26-55	56 Keatas	
1	396	671	523	719	211	2.520

Sumber : *Kantor Desa Batu Gajah, 2009.*

Dari tabel IV.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Batu Gajah adalah orang dewasa yang berumur 26 sampai 55 tahun yaitu 719 orang. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah yang sudah lanjut usia (LANSIA) yaitu 211 orang.

IV.2.3.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.3 di bawah ini:

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Desa Batu Gajah Menurut Jenis Kelamin

No	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		Jumlah
	1	2	
	Laki-Laki	Perempuan	
1	970	1550	2.520

Sumber : *Kantor Desa Batu Gajah, 2009.*

Dari tabel IV.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, dimana laki-laki hanya 970 orang sedangkan jumlah perempuan 1550 orang.

IV.2.3.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Memeluk Agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia di jamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampuradukkan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat Batu Gajah adalah beragama Islam. Walaupun Islam sebagai agama yang mayoritas, tidak ada penekanan maupun pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama yang minoritas.

Hal ini membuktikan telah mantapnya toleransi antar umat beragama. Kerukunan umat beragama serta kesadaran untuk mengamalkan pancasila. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.4 di bawah ini:

Tabel IV.4 :Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Desa Batu Gajah.

No	Jumlah Penduduk Menurut Agama					Jumlah
	1	2	3	4	5	
	Islam	Khatolik	Protestan	Hindu	Budha	
1	2.510	6	4	-	-	2.520

Sumber : *Kantor Desa Batu Gajah, 2009.*

Dari tabel IV.4 di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Batu Gajah mayoritas yaitu 2.510 orang menganut agama Islam, sedangkan agama Khatolik, Protestan, Hindu, dan Budha menjadi agama minoritas yang dianut oleh penduduknya.

IV.2.3.4. Jumlah Rumah Ibadah

Untuk menjalankan perintah Agama tentu sangat diperlukan tempat Ibadah. Dimana tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Dari 5 (lima) agama yang dianut masyarakat Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu yang disebutkan sebelumnya, ternyata tidak semua yang memiliki Rumah Ibadah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel IV.5 di bawah ini:

Tabel IV.5 : Jumlah Rumah Ibadah Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu

No	Jumlah Rumah Ibadah Di Desa Batu Gajah					Jumlah
	1	2	3	4	5	
	Mesjid	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Pura/Kuil	Vihara	
1	2	-	-	-	-	2

Sumber : *Kantor Desa Batu Gajah, 2009.*

Dari tabel IV.5 diatas dapat dilihat bahwa hanya ada 1 (satu) dari 5 (lima) agama yang dianut oleh penduduk Desa Batu Gajah yaitu Mesjid yang memiliki tempat peribadatan Umat Muslim dengan jumlah 2 unit, sedangkan jenis tempat peribadatan bagi penganut agama lainnya masih belum ada.

IV.2.3.5. Tingkat Pendidikan Penduduk

Keadaan penduduk Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu dilihat dari tingkat pendidikan masing-masing dapat dilihat pada tabel IV.6 di bawah ini:

Tabel IV.6 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu

No	Tingkat Pendidikan					
	1	2	3	4	5	6
	Tamat TK	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tamat Akademi/PT	Buta Huruf
1	306	495	525	790	58	236

Sumber : Kantor Desa Batu Gajah, 2009.

Dari tabel IV.6 di atas dapat dilihat bahwa di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir penyu masih ada penduduknya yang buta huruf yaitu 236 orang. Namun walaupun begitu secara umum tingkat pendidikan di Desa Batu Gajah tergolong tinggi dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan SMA dengan jumlah 790 orang.

IV.2.3.6. Jumlah Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Batu Gajah. Pendidikan perlu di tunjang oleh prasarana yang memadai pada

umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai tingkat SMA.

Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu didapati sarana pendidikan menurut jenjangnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.7 berikut:

Tabel IV.7 : Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu

No	Jumlah Sarana Pendidikan					Jumlah
	1 TK	2 SD	3 SMP	4 SLTA/ SMK	5 Akademi/PT	
1	-	1	2	2	-	5

Sumber : Kantor Desa Batu Gajah, 2009.

Dari tabel IV.7 di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu belum memadai, karena sarana pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) belum ada.

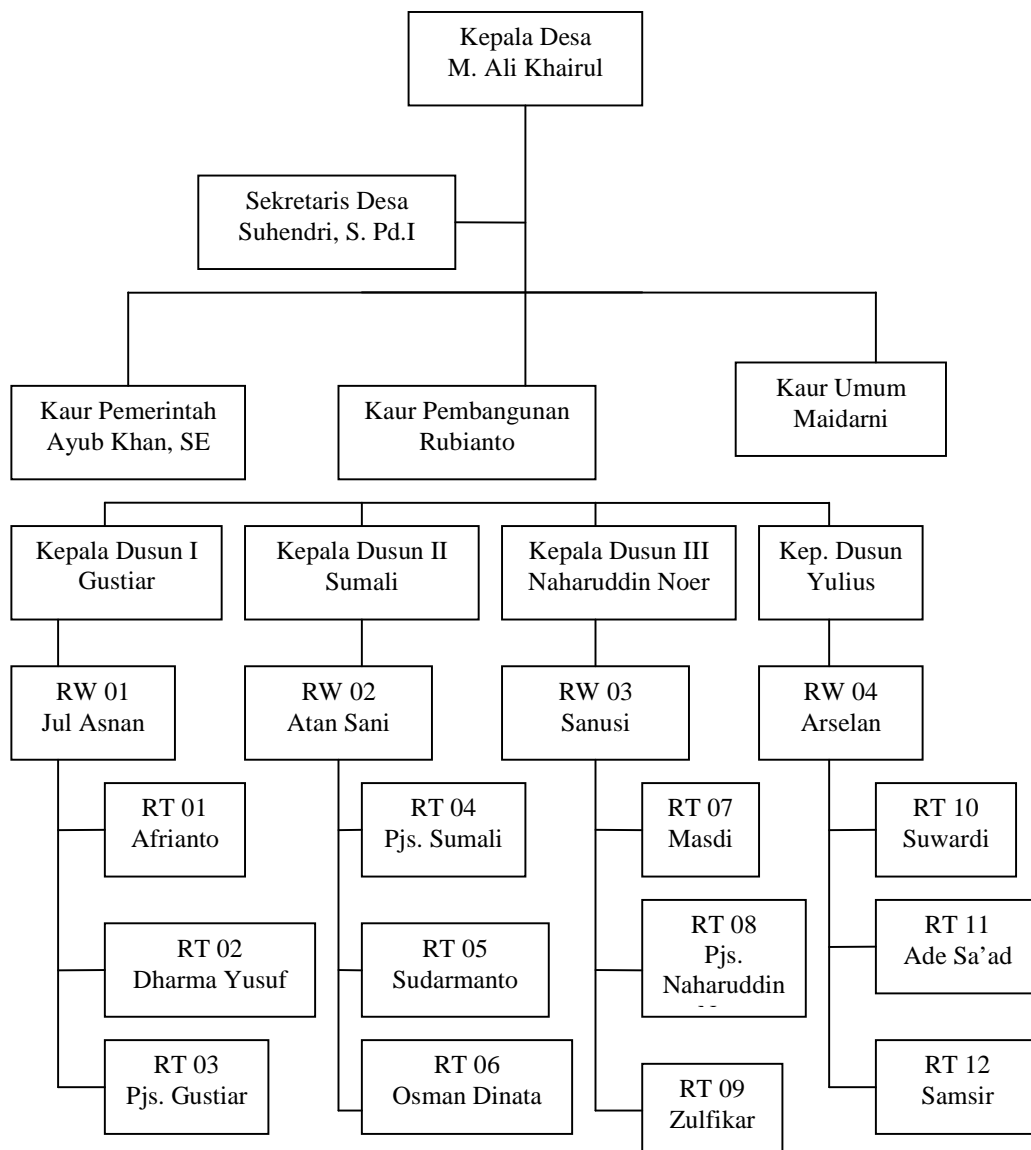
IV. 2.3.7. Struktur Pemerintahan

Tugas-tugas pemerintah pada umumnya adalah melayani berbagai kepentingan masyarakat (penduduk) dalam berbagai segi kehidupan mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, kesehatan, kependudukan dan sebagainya.

Desa Batu gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 4 dusun, sebagai lembaga social milik pemerintah harus memberikan sumbangan yang besar dalam *welfare state* sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945 Bab empat yang berbunyi : “.....memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”. Untuk melihat Struktur organisasi Pemerintahan Desa Batu Gajah dapat dilihat pada skema berikut :

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batu Gajah



Sumber : Kantor Desa Batu Gajah, 2009.

Untuk menegaskan pola dan tata pembagian serta hubungan kerja pada unsur-unsur organisasi pemerintah Desa, kedudukan, tugas dan fungsi unit kerja dalam struktur organisasi pemerintahan Desa dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa :

- a. Kedudukan sebagai alat pemerintah dan unit pelaksanaan pemerintahan desa.
- b. Tugasnya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintahan, melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat.
- c. Fungsi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga, melaksanakan koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintahan pusat dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretaris Desa :

- a. Berkedudukan sebagai unsur pelayanan atau staf di bidang tata usaha Kepala Desa dan memimpin sekretaris Desa.
- b. Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta memberi pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.

- c. Fungsinya melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas kepala Desa dalam hal bila Kepala Desa berhalangan.

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Urusan :

- a. Berkedudukan sebagai pembantu bidang tugas masing-masing.
- b. Bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
- c. Berfungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengelolaan data/informasi yang menyangkut bidang tugas masing-masing.

4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Dusun :

- a. Berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Bertugas melaksanakan pemerintahan Desa dibawah kepemimpinan Kepala Desa wilayah kerjanya.
- c. Berfungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta melaksanakan keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1. Identitas Responden

Sebelum hasil penelitian ini disampaikan, terlebih dahulu peneliti akan menjabarkan identitas responden. Adapun responden di sini adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel penelitian yang terlibat langsung dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan Desa Batu Gajah. Untuk jelasnya, akan diuraikan.

Responden memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, sebagaimana dapat dilihat pada tabel V.1 di bawah ini:

Tabel. V.1 : Tingkat Pendidikan Responden

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1	SD	9	25%
2	SLTP	8	22%
3	SLTA	18	50%
4	DIPLOMA/S1	1	3%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Menurut tabel V.1 di atas maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden yang berjumlah 36 orang, sebanyak 9 orang tamatan SD dengan persentase 25%, yang tamat SMP sebanyak 8 orang dengan persentase 22%, yang tamat SMA sebanyak 18 orang dengan persentase 50% dan sebanyak 1 orang yang tamatan perguruan tinggi dengan persentase 3%.

Sama halnya dengan tingkat pendidikan responden, perbedaan juga terjadi pada masa lamanya responden menjadi anggota simpan pinjam untuk kelompok perempuan Desa Batu Gajah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.2 di bawah ini:

Tabel. V.2 : Masa Responden Menjadi Anggota Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Desa Batu Gajah.

NO	Kelompok Masa	Jumlah	Persentase(%)
1	0 - 6 bulan	7	19,44%
2	7 – 12 bulan	2	5,55%
3	13 – 18 bulan	3	8,33%
4	19 - 24 bulan	7	19,44%
5	25 bulan keatas	17	47,22%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010*

Dari tabel V.2 di atas dapat dilihat bahwa masa responden menjadi anggota simpan pinjam untuk kelompok perempuan Desa Batu Gajah bervariasi, dimana ada 7 (tujuh) orang atau 19,44% responden yang menjadi anggota pada kelompok masa pertama, pada kelompok masa kedua ada 2 (dua) orang atau 5,55% responden yang menjadi anggota, pada kelompok masa ketiga ada 3 (tiga) orang atau 8,33% responden yang menjadi anggota, pada kelompok masa keempat ada 7 (tujuh) atau 19,44% orang responden yang menjadi anggota, sedangkan yang lainnya sudah menjadi anggota lebih dari 25 (dua puluh lima) bulan ke atas.

Responden di atas juga memiliki jenis usaha yang berbeda, sebagaimana dapat dilihat pada tabel V.3 di bawah ini.

Tabel. V.3 : Jenis Usaha Responden

NO	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Perdagangan	15	41,66%
2	Industri Kecil	7	19,44%
3	Peternakan	7	19,44%
4	Jasa	7	19,44%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Menurut tabel V.3 di atas maka dapat dilihat bahwa jenis usaha perdagangan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis usaha lainnya, yaitu 15 orang atau 41,66% responden berada pada jenis usaha yang pertama dan tujuh orang untuk tiap-tiap kelompok jenis usaha di bawahnya.

Selain perbedaan-perbedaan responden yang telah disebutkan sebelumnya, ternyata tingkat penghasilan mereka juga perbulannya berbeda-beda. Untuk mengetahui penghasilan responden perbulannya maka dapat dilihat pada tabel V.4 di bawah ini.

Tabel. V.4 : Penghasilan Responden Perbulan

NO	Kelompok Penghasilan	Jumlah	Persentase (%)
1	$\leq 1.500.000$	22	61,11%
2	$> 1.500.000 - 3.000.000$	10	27,77%
3	$> 3.000.000 - 4.500.000$	2	5,55%
4	$> 4.500.000 - 6.000.000$	1	2,77%
5	$> 6.000.000$	1	2,77%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.4 di atas dapat dilihat bahwa penghasilan kebanyakan responden (22 orang atau 61,11%) berada pada kelompok pertama yakni antara $\leq 1.500.000$.

sedangkan responden paling sedikit (1 orang atau 2,77 %) berada pada kelompok penghasilan ke tiga dan keempat, yakni antara > 4.500.000 – 6.000.000 dan > 6.000.000.

V.2. Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri – Simpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan Di Desa Batu Gajah

Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2007 Studi Pada kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Tujuan program
2. Ketentuan Dasar
3. Ketentuan Pendanaan

Berdasarkan hal yang demikian, di dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan satu-persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan oleh responden terhadap pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu, baik itu dengan menjawab kuesioner yang telah disebarkan maupun jawaban-jawaban responden sewaktu wawancara.

V.2.1. Tujuan Program

Pada dasarnya tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri khususnya simpan pinjam untuk kelompok perempuan adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan strategi mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mengetahui tanggapan responden yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan tujuan program dari kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan ini, dalam mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam yang ada di pedesaan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu dapat kita lihat pada tabel V.5 di bawah ini :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Tentang Tujuan Program Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Dalam Mengembangkan Potensi Kegiatan Simpan Pinjam Pedesaan Di Desa Batu Gajah.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	5	13,88%
2	Sesuai	28	77,77%
3	Cukup Sesuai	3	8,33%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.5 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 28 orang atau 77,77% sesuai terhadap tujuan program simpan pinjam untuk kelompok

perempuan sebagai pengembangan potensi simpan pinjam pedesaan. Sebaliknya tidak ada satupun responden yang menilai tujuan program yang pertama ini kurang sesuai dan belum sesuai sama sekali.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan ini dapat mengembangkan potensi simpan pinjam pedesaan di Desa Batu Gajah. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan responden yaitu 28 orang atau 77,77% memberi penilaian sesuai.

Sedangkan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan tujuan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang kedua yaitu dalam memberikan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro di Desa Batu Gajah, dapat dilihat pada tabel V.6 berikut:

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Tentang Tujuan Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan untuk memberikan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	4	11,11%
2	Sesuai	4	11,11%
3	Cukup Sesuai	3	8,33%
4	Kurang Sesuai	25	69,44%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.6 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 25 orang atau 69,44% kurang sesuai dengan tujuan Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dalam memberikan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, namun tidak ada responden yang menilai belum sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan belum dapat memberikan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro Desa Batu Gajah. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (69,44%) menilai tujuan Program kurang sesuai.

Hasil wawancara dengan Ibu Waginem yang mengatakan ”saya sempat kesulitan dalam membuat proposal usaha untuk pengajuan pinjaman”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada kesulitan dalam membuat proposal usaha untuk pengajuan pinjaman, karena kebanyakan dari masyarakat tidak mengerti dan kurang informasi tentang bagaimana cara membuat proposal tersebut.

Faktor ini juga menyebabkan kemudahan akses dalam pendanaan usaha skala mikro menjadi terhambat. Sehingga masih ada dijumpai dilapangan masyarakat miskin yang memiliki usaha belum pernah mendapatkan dana dari program PNPM Mandiri tersebut.

Sedangkan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan tujuan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang ketiga yaitu dalam mengurangi rumah tangga miskin di Desa Batu Gajah, dapat dilihat pada tabel V.7 berikut:

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Tentang Tujuan Program Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Untuk Mengurangi Rumah Tangga Miskin.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	8	22,22%
2	Sesuai	12	33,33%
3	Cukup Sesuai	10	27,77%
4	Kurang Sesuai	6	16,66%
5	Belum Sesuai	-	0%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.7 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 12 orang atau 33,33 % sesuai dengan tujuan Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dalam mengurangi rumah tangga miskin, sebaliknya tidak ada satupun responden yang menilai tujuan program yang ketiga ini belum sesuai sama sekali.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dapat mengurangi rumah tangga miskin Desa Batu Gajah. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (33,33%) menilai tujuan Program sudah sesuai.

Sedangkan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan tujuan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang keempat yaitu dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin di Desa Batu Gajah, dapat dilihat pada tabel V.8 berikut:

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Tentang Tujuan Program Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Untuk Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Miskin.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	2	5,55%
2	Sesuai	20	55,55%
3	Cukup Sesuai	13	36,11%
4	Kurang Sesuai	-	0%
5	Belum Sesuai	1	2,77%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.8 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 20 orang atau 55,55 % sesuai dengan tujuan Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin, sebaliknya ada 1 orang atau 2,77% responden yang menilai tujuan program ini belum sesuai dan tidak ada satupun responden yang menilai tujuan program yang keempat ini kurang sesuai sama sekali.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin Desa Batu Gajah. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (55,55%) menilai tujuan Program sudah sesuai.

Sedangkan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan tujuan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang kelima yaitu dalam mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan di Desa Batu Gajah, dapat dilihat pada tabel V.9 berikut:

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Tentang Tujuan Program Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Untuk Mendorong Penguatan Kelembagaan Simpan Pinjam Oleh Kaum Perempuan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	9	25%
2	Sesuai	14	38,88%
3	Cukup Sesuai	10	27,77%
4	Kurang Sesuai	3	8,33%
5	Belum Sesuai	-	0%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.9 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 14 orang atau 38,88 % sesuai dengan tujuan Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dalam mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan, sebaliknya tidak ada satupun responden yang menilai tujuan program yang kelima ini belum sesuai sama sekali.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dapat mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan Desa Batu Gajah. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (38,88%) menilai tujuan Program sudah sesuai.

Sedangkan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan tujuan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang keenam yaitu dalam menciptakan lapangan kerja bagi kaum perempuan di Desa Batu Gajah, dapat dilihat pada tabel V.10 berikut:

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Tentang Tujuan Program Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Kaum Perempuan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	5	13,88%
2	Sesuai	21	58,33%
3	Cukup Sesuai	3	8,33%
4	Kurang Sesuai	5	13,88%
5	Belum Sesuai	2	5,55%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.10 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 21 orang atau 58,33 % sesuai dengan tujuan Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dalam menciptakan lapangan kerja bagi kaum perempuan, namun ada 2 orang atau 5,55% responden yang menilai tujuan program yang keenam ini belum sesuai.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri khususnya kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan dapat menciptakan lapangan kerja bagi kaum perempuan di Desa Batu Gajah. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (58,33%) menilai tujuan Program sudah sesuai.

Hasil wawancara dengan Ibu Rostinah yang mengatakan ” Sekarang usaha keripik pisang saya ini dapat mempekerjakan 6 orang pekerja perempuan, karena saya mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha saya ”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya kegiatan simpan pinjam ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan.

Hasil dilapangan juga menunjukkan bahwa yang dulunya kaum Ibu-ibu hanya dirumah saja, tetapi sekarang mereka telah mempunyai kegiatan yang lebih bermanfaat. Dengan bekerja mereka telah ikut membantu suami mereka dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka.

Yang dulunya ekonomi rumah tangga mereka hanya bisa untuk makan saja, namun sekarang mereka telah bisa meningkatkan ekonominya dengan membeli barang-barang yang mereka inginkan. Kehidupan mereka pun telah meningkat kesejahteraannya dibanding sebelumnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri khususnya Kegiatan Simpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan (SPP) ini dapat membantu masyarakat miskin, dimana telah menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka dan ekonomi mereka dapat meningkat. Dan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah terealisasi dalam program ini.

Selanjutnya, untuk mengetahui pelaksanaan tujuan Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan secara keseluruhan di Desa Batu Gajah dapat dilihat pada tabel V.11 berikut:

Tabel V.11 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Tujuan Program Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jum lah
		SS	S	CS	KS	BS	
1	Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan	5	28	3	-	-	36
		13,88%	77,77%	8,33%	-	-	100 %
2	Memberikan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro	4	4	3	25	-	36
		11,11%	11,11%	8,33%	69,44 %	-	100 %
3	Mengurangi rumah tangga miskin	8	12	10	6	-	36
		22,22%	33,33%	27,77%	16,66 %	-	100 %
4	Meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin	2	20	13	-	1	36
		5,55%	55,55%	36,11%	-	2,77%	100 %
5	Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam untuk kelompok perempuan	9	14	10	3	-	36
		25%	38,88%	27,77%	8,33%	-	100 %
6	Menciptakan lapangan kerja bagi kaum perempuan	5	21	3	5	2	36
		13,88%	58,33%	8,33%	13,88 %	5,55%	100 %
Total		33	99	42	39	3	216
		15,27%	45,83%	19,44%	18,05 %	1,38%	100 %
Rata-Rata		5,5	16,5	7	6,5	0,5	36
		15,27%	45,83%	19,44%	18,05 %	1,38%	100 %

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Keterangan:

SS : Sangat sesuai

S : Sesuai

CS : Cukup Sesuai

KS : Kurang Sesuai

BS : Belum Sesuai

Dari tabel V.11 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 45,83% menilai tujuan Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Desa Batu Gajah sudah sesuai, namun ada responden yaitu 18,05% yang menilai kurang sesuai. Melalui uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tujuan Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu adalah sudah Sesuai berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 tahun 2007, yaitu:

1. Mampu mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Mampu memberikan kemudahan akses simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Mampu mengurangi rumah tangga miskin di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Mampu meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Mampu mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Mampu menciptakan lapangan kerja bagi kaum perempuan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu.

V.2.2. Ketentuan Dasar

Ketentuan dasar dari pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2007, ketentuan dasar pelaksanaannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan pendanaan tanpa syarat agunan.
2. Tiap kelompok mempunyai tata cara dan prosedur yang baku.
3. Proses pengelolaan kegiatannya didasari oleh keputusan yang profesional.
4. Kegiatannya berorientasi pada peningkatan pendapatan.
5. Pengelolaan dananya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
6. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap ketentuan dasar dari kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang diamanatkan oleh Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel V.12 berikut:

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Dasar, Dimana Masyarakat Miskin Mendapatkan Pelayanan Pendanaan Tanpa Syarat Agunan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	6	16,66%
2	Sesuai	8	22,22%
3	Cukup Sesuai	3	8,33%
4	Kurang Sesuai	16	44,44%
5	Belum Sesuai	3	8,33%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.12 di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden yaitu 16 orang atau 44,44% kurang sesuai dengan pelayanan pendanaan tanpa syarat agunan, namun masih ada juga belum sesuai sama sekali yaitu 3 orang atau 8,33%.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendanaan tanpa syarat agunan yang ada pada simpan pinjam untuk kelompok perempuan Desa Batu Gajah, masih memberatkan masyarakat miskin, karena terdapat responden yang menilai kurang sesuai sebanyak 16 orang atau 44,44%..

Hasil wawancara dengan Ketua kelompok Mawar Desa Batu Gajah, Ibu Masni mengatakan "Sebenarnya pihak pengelola simpan pinjam sudah pernah melakukan penerapan persyaratan yang longgar tanpa agunan bagi masyarakat miskin pada perguliran sebelumnya namun ada beberapa pemanfaat tidak melakukan pengembalian pinjaman dengan lancar, sehingga kebijakan sedikit dirubah dengan

memasukkan agunan dengan tujuan agar pemanfaat lebih sadar akan kewajibannya mengembalikan pinjaman”

Menurut uraian tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pihak pengelola kegiatan pernah memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa persyaratan yang memberatkan, tetapi pemanfaat banyak yang menyalah gunakan kemudahan tersebut, kemudian persyaratan pinjaman sedikit ditambah dengan agunan, dengan harapan pemanfaat lebih bertanggung jawab terhadap pinjamannya dengan adanya agunan tersebut.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap ketentuan dasar yang kedua yaitu tiap kelompok mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dapat dilihat pada tabel V.13 berikut:

Tabel V.13 : Tanggapan Responden Terhadap Ketentuan Dasar Simpan Pinjam, Dimana Tiap Kelompok Mempunyai Tata Cara Dan Prosedur Yang Baku.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	3	8,33%
2	Sesuai	17	47,22%
3	Cukup Sesuai	8	22,22%
4	Kurang Sesuai	6	16,66%
5	Belum Sesuai	2	5,55%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Menurut tabel V.13 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 17 orang atau 47,22% sudah sesuai bahwa setiap kelompok mempunyai tata cara dan prosedur yang baku. Walaupun mayoritas responden sesuai dengan ketentuan yang demikian, masih terdapat 2 orang atau 5,55% responden yang belum sesuai.

Dari uraian tabel V.13 di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kelompok mempunyai tata cara dan prosedur yang baku. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan responden 17 orang atau 47,22% sudah sesuai terhadap ketentuan yang demikian.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap ketentuan dasar selanjutnya yaitu dimana pengelolaan kegiatannya didasari oleh keputusan yang professional dapat dilihat pada tabel V.14 berikut:

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan Kegiatan Yang Didasari Oleh Keputusan Yang Professional.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	7	19,44%
2	Sesuai	15	41,66%
3	Cukup Sesuai	12	33,33%
4	Kurang Sesuai	2	5,55%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.14 di atas, dapat dilihat bahwa kebanyakan responden yakni 15 orang atau 41,66% menilai tentang pengelolaan kegiatannya didasari oleh keputusan yang professional sudah sesuai, namun sebaliknya masih ada yang kurang sesuai yaitu 2 orang atau 5,55%.

Menurut uraian tabel V.14 di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengelolaan kegiatan simpan pinjam sudah didasari keputusan yang professional di Desa Batu Gajah sudah Sesuai, dimana tanggapan kebanyakan responden yaitu 15 orang atau 41,66% menilai sesuai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap ketentuan dasar pelaksanaan simpan pinjam ini yang selanjutnya yaitu harus berorientasi pada peningkatan pendapatan dapat dilihat pada tabel V.15 berikut:

Tabel V.15 : Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Dasar Kegiatan Yang Berorientasi Pada Peningkatan Pendapatan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	13	36,11%
2	Sesuai	16	44,44%
3	Cukup Sesuai	3	8,33%
4	Kurang Sesuai	3	8,33%
5	Belum Sesuai	1	2,77%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.15 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 16 orang atau 44,44% sudah sesuai terhadap pelaksanaan ketentuan dasar kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan, namun 1 orang atau 2,77% responden menilai masih belum sesuai.

Dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan dasar kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan sudah sesuai, karena terdapat kebanyakan responden yaitu 16 orang atau 44,44% menilai sudah sesuai.

Kemudian untuk melihat tanggapan responden terhadap pelaksanaan ketentuan dasar simpan pinjam ini yang selanjutnya yaitu pengelolaan dananya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, Dengan transparansi atau keterbukaan

maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*accountable*).

Dengan keterbukaan memudahkan masyarakat dalam:

1. Memperoleh informasi secara lengkap dan terus-menerus tentang segala sesuatu yang menyangkut simpan pinjam untuk kelompok perempuan
2. Menumbuh kembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan simpan pinjam untuk kelompok perempuan
4. Meningkatkan saling percaya diantara sesama pelaku atau anggota simpan pinjam untuk kelompok perempuan

, Selanjutnya tanggapan respondennya dapat dilihat pada tabel V.16 berikut:

Tabel V.16 : Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Pengelolaan Dana Dapat Dipertanggung Jawabkan Kepada Masyarakat.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	9	25%
2	Sesuai	15	41,66%
3	Cukup Sesuai	9	25%
4	Kurang Sesuai	3	8,33%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Berdasarkan tabel V.16 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 15 orang atau 41,66% sudah sesuai terhadap pelaksanaan ketentuan yang dapat

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, namun walaupun begitu masih ada juga responden yang merasa kurang sesuai yaitu 3 orang atau 8,33%.

Menurut uraian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari kebanyakan responden 25 orang atau 41,66% sudah sesuai.

Hasil penilaian di atas juga didukung oleh penyampaian ketua UPK-SPP Pasir Penyu Bapak Iwan, yaitu:

”Pada setiap bulannya pengelola UPK-SPP Pasir Penyu akan menempelkan laporan bulanan tentang perkembangan UPK-SPP Pasir Penyu di papan informasi yang sudah disediakan dan begitu pula dengan hal-hal yang bersangkutan dengan SPP, seperti neraca SPP, ketentuan dan persyaratan pinjaman, daftar tunggu anggota dan bagi masyarakat yang ingin lebih mengenal SPP, kami Pengelola dengan senang hati melayaninya selagi masih dalam koridor yang baik.”

Dari survey yang dilakukan, peneliti melihat bahwa transparansi pengelolaan dana SPP, sudah begitu baik. Hal ini terbukti ketika peneliti ingin mengambil data disana, tidak ada kesulitan yang berarti yang peneliti jumpai. Begitu juga ketika ada masyarakat yang menanyakan tentang Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) tersebut, dengan ramah pengelola melayani, dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ketentuan pelaksanaan simpan pinjam yang terakhir adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap ketentuan yang selanjutnya yaitu dapat dilihat pada tabel V.17 berikut:

Tabel V.17 : Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	16	44,44%
2	Sesuai	11	30,55%
3	Cukup Sesuai	9	25%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.17 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 16 orang atau 44,44% menilai ketentuan yang terakhir ini sangat sesuai, ditambah dengan 11 orang responden atau 30,55% yang menilai sesuai.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah termasuk dalam kategori peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari 36 orang responden terdapat 16 orang atau 44,44% sangat sesuai.

Berdasarkan survey di lapangan dapat dijumpai masyarakat yang dulunya memiliki ekonomi lemah, namun sekarang ekonomi mereka perlahan-lahan mengalami perubahan atau mengalami peningkatan.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri khusus Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) ini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan ketentuan dasar simpan pinjam secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.18 berikut:

Tabel V.18 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Ketentuan Dasar Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Desa Batu Gajah.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	CS	KS	BS	
1	Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan pendanaan tanpa syarat agunan	6	8	3	16	3	36
		16,66%	22,22 %	8,33%	44,44 %	8,33 %	100%
2	Setiap kelompok mempunyai tata cara dan prosedur yang baku	3	17	8	6	2	36
		8,33%	47,22 %	22,22 %	16,66 %	5,55 %	100%
3	Pengelolaan kegiatan didasari keputusan professional	7	15	12	2	-	36
		19,44%	41,66 %	33,33 %	5,55%	-	100%
4	Berorientasi pada peningkatan pendapatan	13	16	3	3	1	36
		36,11%	44,44 %	8,33%	8,33%	2,77 %	100%
5	Pengelolaan dananya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat	9	15	9	3	-	36
		25%	41,66 %	25%	8,33%	-	100%
6	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	16	11	9	-	-	36
		44,44%	30,55 %	25%	-	-	100%
Total		54	82	44	30	6	216
		25%	37,96 %	20,37 %	13,88 %	2,77 %	100%
Rata-Rata		9	13,66	7,33	5	1	36
		25%	37,96 %	20,37 %	13,88 %	2,77 %	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.18 di atas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 37,96% menilai seluruh ketentuan pelaksanaan simpan pinjam untuk kelompok perempuan ini berada pada katagori sesuai, namun masih ada responden yang kurang sesuai yaitu 13,88%, bahkan ada juga responden yang belum sesuai sama sekali yaitu 2,77%.

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ketentuan pelaksanaan dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan Desa Batu Gajah sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 Tahun 2007. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.18 yang ternyata kebanyakan responden yaitu 37,96% sudah sesuai terhadap pelaksanaan ketentuan simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang ada di Desa Batu Gajah.

V.2.3. Ketentuan Pendanaan

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.

Dimana ketentuan pendanaan ini dilihat dari sasaran program yaitu rumah tangga miskin yang produktif, bentuk kegiatannya yaitu memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi bagi kelompok perempuan dan ketentuan kelompok simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap ketentuan pendanaan diatas dapat dilihat pada tabel V.19 berikut:

Tabel V.19 : Tanggapan Responden Terhadap Sasaran Program Yaitu Rumah Tangga Miskin Yang Produktif

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	14	38,88%
2	Sesuai	17	47,22%
3	Cukup Sesuai	1	2,77%
4	Kurang Sesuai	4	11,11%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.19 di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden yaitu 17 orang atau 47,22% sesuai dengan sasaran program dari simpan pinjam, bahkan ada juga yang kurang sesuai sama yaitu 4orang atau 11,11%.

Berdasarkan urian di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran program yang ada pada simpan pinjam untuk kelompok perempuan Desa Batu Gajah sudah sesuai karena kebanyakan responden 17 orang atau 47,22% menyatakan sasaran program tersebut sesuai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap ketentuan pendanaan selanjutnya dapat dilihat pada tabel V.20 berikut:

Tabel V.20 : Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Dana Pinjaman Sebagai Tambahan Modal Usaha.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	11	30,55%
2	Sesuai	15	41,66%
3	Cukup Sesuai	10	27,77%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Berdasarkan tabel V.20 di atas diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 15 orang atau 41,66% menilai ketentuan pendanaan kedua ini sesuai.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan pendanaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 Tahun 2007 sudah Sesuai bagi masyarakat, karena kebanyakan responden 13 orang atau 41,66% sudah sesuai terhadap ketentuan pendanaan dimana dana pinjaman sebagai tambahan modal usaha.

Sedangkan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap ketentuan pendanaan yang ketiga yaitu setiap kelompok memiliki hanya beranggotakan kaum perempuan, dapat dilihat pada tabel V.21 berikut:

Tabel V.21 : Tanggapan Responden Terhadap Ketentuan Kelompok Yang Hanya Beranggotakan Kaum Perempuan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	15	41,66%
2	Sesuai	17	47,22%
3	Cukup Sesuai	3	8,33%
4	Kurang Sesuai	1	2,77%
5	Belum Sesuai	-	0%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.21 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 17 orang atau 47,22 % sesuai dengan ketentuan kelompok yang hanya beranggotakan kaum perempuan, sebaliknya tidak ada satupun responden yang menilai ketentuan kelompok ini belum sesuai sama sekali.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan kelompok hanya beranggotakan kaum perempuan sudah terlaksana. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (47,22%) menilai ketentuan kelompok sudah sesuai.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap ketentuan pendanaan yang keempat yaitu setiap kelompok memiliki organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana dapat dilihat pada tabel V.22 berikut:

Tabel V.22 : Tanggapan Responden Terhadap Ketentuan Kelompok Harus Memiliki Organisasi Dan Administrasi Secara Sederhana.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	4	11,11%
2	Sesuai	23	63,88%
3	Cukup Sesuai	5	13,88%
4	Kurang Sesuai	4	11,11%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.22 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 23 orang atau 63,88 % sesuai dengan ketentuan kelompok harus memiliki organisasi dan administrasi secara sederhana, namun masih ada responden yang menilai kurang sesuai sebanyak 4 orang atau 11,11%.

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan kelompok harus memiliki organisasi dan administrasi secara sederhana sudah terlaksana. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (63,88%) menilai ketentuan kelompok sudah sesuai.

Hasil wawancara dengan Ibu Tuti ketua kelompok Maju Usaha Sepakat yang mengatakan ” Kelompok kami mengadakan rapat bulanan tiap tanggal 10 dan kami juga memiliki buku Kas kelompok ”

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ketentuan pendanaan yang mewajibkan tiap kelompok memiliki organisasi dan administrasi secara sederhana sudah sesuai, karena setiap bulannya masing-masing kelompok mengadakan rapat dan mereka memiliki buku Kas yang gunanya untuk mencatat semua kegiatan dan transaksi simpan pinjam ini.

Kondisi diatas dapat peneliti benarkan, karena berdasarkan observasi peneliti di lapangan ketika berkunjung ke kantor pengelola kegiatan simpan pinjam ini, setiap ketua kelompok yang datang untuk menyetorkan dana pinjaman, mereka wajib memperlihatkan buku Kas kelompok mereka. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini bertujuan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelompok simpan pinjam Desa Batu Gajah telah mengikuti ketentuan yang ketiga ini dengan memiliki organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap ketentuan pendanaan yang kelima yaitu setiap kelompok memiliki aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman dapat dilihat pada tabel V.23 berikut:

Tabel V.23 : Tanggapan Responden Terhadap Ketentuan Kelompok Harus Memiliki Aturan Pengelolaan Dana Simpanan Dan Dana Pinjaman.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	4	11,11%
2	Sesuai	16	44,44%
3	Cukup Sesuai	8	22,22%
4	Kurang Sesuai	7	19,44%
5	Belum Sesuai	1	2,77%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.23 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 16 orang atau 44,44% sesuai dengan ketentuan kelompok harus memiliki aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman, namun masih ada responden yang menilai kurang sesuai sebanyak 7 orang atau 19,44% bahkan ada responden yang menilai belum sesuai 1 orang atau 2,77%..

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan kelompok harus memiliki aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman sudah terlaksana. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (44,44%) menilai ketentuan kelompok sudah sesuai.

Jadi, dapat disimpulkan tiap kelompok telah memiliki aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap ketentuan pendanaan yang keenam yaitu setiap kelompok saling mengenal satu sama lain, dapat dilihat pada tabel V.24 berikut:

Tabel V.24 : Tanggapan Responden Terhadap Ketentuan Kelompok Saling Mengenal Satu Sama Lain.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	10	27,77%
2	Sesuai	15	41,66%
3	Cukup Sesuai	8	22,22%
4	Kurang Sesuai	2	5,55%
5	Belum Sesuai	1	2,77%
Jumlah		36	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.24 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 15 orang atau 41,66% sesuai dengan ketentuan kelompok harus saling mengenal satu sama lain, namun masih ada responden yang menilai kurang sesuai sebanyak 2 orang atau 5,55% bahkan ada responden yang menilai belum sesuai 1 orang atau 2,77%..

Dari tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan kelompok harus saling mengenal satu sama lain sudah terlaksana. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (41,66%) menilai ketentuan kelompok sudah sesuai.

Hasil wawancara dengan Ibu Junaida, dia mengatakan ” Sejak saya menjadi anggota simpan pinjam ada manfaat yang saya dapat, yaitu saya dapat menjalin silaturahmi dengan anggota lain yang dulunya saya belum mengenal mereka”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menjadi anggota simpan pinjam kita dapat menjalin tali silaturahmi dengan sesama anggota, ini berarti ketentuan pendanaan dari simpan pinjam sudah sesuai karena tiap anggota kelompok saling mengenal satu sama lainnya.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap ketentuan pendanaan secara keseluruhan pada simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang ada di Desa Batu Gajah dapat dilihat pada tabel V.25 berikut:

Tabel V.25 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Ketentuan Pendanaan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Desa Batu Gajah.

N O	Sub Indikator	Pengukuran					Jumla h
		SS	S	CS	KS	BS	
1	Sasaran programnya rumah tangga miskin yang produktif	14	17	1	4	-	36
		38,88%	47,22 %	2,77%	11,11 %	-	100%
2	Memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal usaha	11	15	10	-	-	36
		30,55%	41,66 %	27,77 %	-	-	100%
3	Tiap kelompok beranggotakan kaum perempuan	15	17	3	1	-	36
		41,66%	47,22 %	8,33%	2,77%	-	100%
4	Tiap kelompok memiliki organisasi dan administrasi	4	23	5	4	-	36
		11,11%	63,88 %	13,88 %	11,11 %	-	100%
5	Tiap kelompok memiliki aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman	4	16	8	7	1	36
		11,11%	44,44 %	22,22 %	19,44 %	2,77 %	100%
6	Tiap kelompok saling mengenal satu sama lain	10	15	8	2	1	36
		27,77%	41,66 %	22,22 %	5,55%	2,77 %	100%
Total		58	103	35	18	2	216
		26,85%	47,68 %	16,20 %	8,33%	0,92 %	100%
Rata-Rata		9,66	17,16	5,83	3	0,33	36
		26,85%	47,68 %	16,20 %	8,33%	0,92 %	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.25 di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pendanaan secara keseluruhan pada simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang ada di Desa Batu Gajah sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 Tahun 2007. Karena ternyata kebanyakan responden yaitu 47,68% sudah sesuai dengan ketentuan pendanaan, namun masih ada responden yang kurang sesuai yaitu 8,33%.

Menurut uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan ketentuan pendanaan pada simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang ada di Desa Batu Gajah sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 Tahun 2007. Dimana kebanyakan responden yaitu 47,68% sudah merasa sudah sesuai terhadap ketentuan pendanaan.

V.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pada Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Di Desa Batu Gajah.

Dari beberapa uraian tabel sebelumnya mengenai tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pada Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Di Desa Batu Gajah yang terdiri dari:

1. Tanggapan responden terhadap tujuan program yaitu:
 - 1) Untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan
 - 2) Memberikan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro
 - 3) Mengurangi rumah tangga miskin

- 4) Meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin
 - 5) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan
 - 6) Menciptakan lapangan kerja bagi kaum perempuan
2. Tanggapan responden terhadap ketentuan dasar Program yaitu:
- 1) Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan pendanaan tanpa syarat agunan
 - 2) Tiap kelompok mempunyai tata cara dan prosedur yang baku
 - 3) Pengelolaan kegiatannya didasari oleh keputusan yang professional
 - 4) Kegiatannya berorientasi pada peningkatan pendapatan
 - 5) Pengelolaan dananya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat
 - 6) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan.
3. Tanggapan responden terhadap ketentuan pendanaan yaitu:
- 1) Sasaran programnya yaitu rumah tangga miskin produktif
 - 2) Memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal
 - 3) Tiap kelompok beranggotakan kaum perempuan
 - 4) Tiap kelompok mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana
 - 5) Tiap kelompok memiliki kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman
 - 6) Tiap anggota kelompok saling mengenal satu sama lain

Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi jawaban responden tentang Pelaksanaan PNPM mandiri khususnya pada kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di bawah ini:

Tabel V.26 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Desa Batu Gajah

NO	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	CS	KS	BS	
1	Tujuan program	33	99	42	39	3	216
		15,27%	45,83%	19,44%	18,05%	1,38%	100%
2	Ketentuan dasar	54	82	44	30	6	216
		25 %	37,96%	20,37%	13,88%	2,77%	100%
3	Ketentuan Pendanaan	58	103	35	18	2	216
		26,85%	47,68%	16,20%	8,33%	0,92%	100%
Total		145	284	121	87	11	648
		22,37%	43,82%	18,67%	13,42%	1,69%	100%
Rata-Rata		8,05	15,77	6,72	4,83	0,61	36
		22,37%	43,82%	18,67%	13,42%	1,69%	100%

Sumber : *Data Olahan Penelitian, 2010.*

Dari tabel V.26 di atas tentang rekapitulasi tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Keputusan Manteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 Tahun 2007, ternyata kebanyakan responden yaitu.43,82% menilai sudah sesuai, namun masih ada responden yang kurang sesuai yaitu 13,42%, bahkan ada responden yang belum sesuai sama sekali yaitu 1,69%.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Simpan Pinjam Untuk Kelompok

Perempuan (SPP) di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu kebanyakan sudah sesuai dengan Keputusan Manteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25 Tahun 2007. Namun masih ada yang masih kurang sesuai yaitu berkenaan dengan kemudahan pendanaan tanpa syarat agunan dan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh data statistik Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) Desa Batu Gajah yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2009, sebagaimana berikut:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Tingkat pengembalian pinjaman | : 96 % |
| 2. Tingkat tunggakan | : 1 % |
| 3. Jumlah Peminjam | : 36 orang |
| 1) Laki-Laki | : - orang |
| 2) Perempuan | : 36 orang |
| 4. Peminjam lunas | : 26 orang |
| 5. Peminjam belum lunas | : 10 orang |
| 6. Saldo pinjaman | : Rp. 234.000.000 |
| 7. Jumlah tunggakan | : Rp. 2.595.000 |
| 8. Jumlah Penunggak | : 4 orang |
| 9. Peminjam jatuh tempo | : 10 orang |
| 10. Nilai jatuh tempo | : Rp. 5.104.000 |

Dari data statistik di atas pada poin satu dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian pinjaman oleh anggota Simpan Pinjam Batu Gajah sudah termasuk tinggi yaitu 96%. Jadi dari data ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Simpan Pinjam Batu Gajah sudah termasuk baik, karena anggota yang jatuh tempo mengembalikan pinjaman hanya ada 2% nya saja, yaitu Rp. 5.104.000 dari saldo pinjaman sebesar Rp 234.000.000.

Selanjutnya dari data statistik di atas, tepatnya pada poin empat dapat diketahui bahwa perempuan yang mendominasi dalam pelaksanaan Simpan Pinjam Desa Batu Gajah. Hal ini dapat dilihat dari 36 orang anggota Simpan Pinjam keseluruhannya adalah perempuan atau 100%. Dengan jumlah anggota perempuan yang menyeluruh, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Simpan Pinjam Desa Batu Gajah sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Keputusan Menkokesra No.25 Tahun 2007 yang menginginkan adanya partisipasi perempuan dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Masih menurut data statistik di atas yaitu pada poin dua, tujuh dan delapan dapat dilihat bahwa masih ada anggota yang menunggak sebanyak 4 orang dengan nilai Rp. 2.595.000 atau 1% dari saldo pinjaman. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada beberapa anggota yang tidak mau membayar angsuran pinjaman tepat pada waktunya. Sehingga yang demikian bisa mengakibatkan ketidak pastian pencairan dana kepada calon anggota yang sudah ada dalam daftar tunggu pemanfaat

selanjutnya, karena dana yang digulirkan adalah dana yang berasal dari pembayaran pinjaman anggota.

Peneliti pernah bertanya kepada tenaga administrasi Simpan Pinjam yang ada di Kecamatan Pasir Penyu yaitu Ibu Evi, kenapa jumlah penunggak masih ada 4 orang banyaknya, Ibu Evi mengatakan bahwa kejadian ini terjadi, karena pada bulan November Tahun lalu tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan yaitu tanggal 8 bertepatan pada hari minggu, sebelum-belumnya jumlah penunggak tidak pernah ada, mungkin kejadian ini dikarenakan berketepatan hari libur saja sehingga ada anggota yang telat membayar sampai terjadilah penunggakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembalian angsuran pinjaman oleh anggota Simpan Pinjam Desa Batu Gajah tepat pada waktunya tergolong tinggi.

Pada setiap bulannya pengelola SPP selalu mengeluarkan laporan tentang perkembangan SPP Batu Gajah dan ditempel di papan informasi. Sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi yang berkenaan dengan SPP Batu Gajah. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat transparansi pengelolaan dana SPP Batu Gajah sudah tergolong baik.

Untuk lebih menyakinkan lagi bahwa Pelaksanaan Simpan Pinjam Batu Gajah sudah baik dan sudah sesuai dengan Keputusan Menkokesra No.25 Tahun 2007, saat penulis mewawancarai salah satu ketua kelompok simpan pinjam yaitu ibu Tuti yang mengatakan bahwa:

”Dari beberapa kelompok yang ada, saya terpilih untuk mengikuti pameran di Jakarta, dimana pameran ini diselenggarakan oleh PNPM Mandiri untuk

memperlihatkan hasil usaha yang telah dibina dan di danai sejak berdirinya PNPM Mandiri. Saya cukup bangga karena untuk Kabupaten Indragiri Hulu hanya 2 Kecamatan saja yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pameran tersebut salah satunya adalah Kecamatan Pasir Penyu dan saya yang ditunjuk oleh ketua UPK Bapak Iwan untuk dikirim mengikuti pameran yang diadakan pada 10 Agustus 2009 tahun lalu. Selain itu saya bisa mempromosikan hasil usaha yang ada di Desa Batu Gajah maupun Kecamatan Pasir Penyu, dengan membawa sejumlah makanan dan kerajinan yang ada untuk pameran kemarin.

Keberhasilan yang diraih oleh Simpan Pinjam Desa Batu Gajah merupakan suatu bukti bahwa Simpan Pinjam Desa Batu Gajah telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program yang ditetapkan dalam Keputusan Menkokesra No.25 Tahun 2007.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan PNPM Mandiri Pada Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pada Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu kebanyakan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2007. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi pada tabel V.27 ke tiga indikator yang dijadikan pengukuran dalam penelitian ini yaitu: Tujuan program, kebanyakan responden yang menilai tujuannya sudah sesuai (45,83%), kemudian ketentuan dasar pelaksanaan simpan pinjam kebanyakan responden juga sesuai (37,96%), selanjutnya ketentuan pendanaan kebanyakan responden menilai sudah sesuai (47,68%).
2. Walaupun Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) kebanyakan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2007, namun masih ada sebagian yang kurang sesuai pada ketentuan dasar pelaksanaan dan tujuan programnya yakni berkaitan dengan kemudahan pendanaan tanpa persyaratan/agunan pinjaman dan

kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yang ditetapkan oleh pengelola SPP yang bersangkutan.

VI.2. Saran

Demi mencapai pelaksanaan PNPM Mandiri Pada Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Batu Gajah yang lebih baik lagi, penulis ingin memberi saran kepada pemerintah, pengelola dan pemanfaat Dana simpan pinjam Desa Batu Gajah, sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah berkenan menambah Dana yang ada pada SPP Desa Batu Gajah, supaya masyarakat yang ingin memperoleh bantuan dana dari SPP di Desa Batu Gajah lebih banyak lagi dayaampungnya dan jumlah dana yang dipinjamkan kepada pemanfaat bisa lebih banyak lagi.
2. Kepada pemerintah sebaiknya persyaratan dan ketentuan-ketentuan program ini ditinjau kembali karena antara tujuan dan persyaratan terkesan bertentangan dimana tujuan program adalah mengentaskan kemiskinan namun dalam persyaratan terkesan memberatkan masyarakat miskin.
3. Agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan maksimal maka persyaratan dan ketentuan-ketentuan pinjaman yang telah diputuskan dalam Musyawarah Desa lebih disosialisasikan kepada masyarakat supaya jangan ada kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai persyaratan dan ketentuan pinjaman.

4. Kepada pemanfaat, agar pelaksanaan program SPP Desa Batu Gajah dapat berjalan dengan lancar, tingkatkanlah kesadaran tentang kewajiban mengembalikan angsuran pinjaman.

Kemudian untuk mencapai efektifitas dalam pelaksanaan simpan pinjam ini penulis juga memberikan saran khususnya pada Pemerintah untuk ke tiga indikator yang dijadikan pengukuran pada penelitian ini yang antara lain :

1. Tujuan program, hendaknya Pemerintah melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan simpan pinjam dan evaluasi kegiatan agar tujuan program dapat tercapai, karena salah satu tujuannya untuk kemudahan akses pendanaan usaha sakal mikro, namun masyarakat pada umumnya merasa kesulitan untuk mendapatkan pendanaan usaha yang memiliki persyaratan seperti membuat proposal usaha sementara kebanyakan masyarakat kita masih banyak yang tidak mengerti.
2. Ketentuan dasar, agar pelaksanaan ketentuan dasar dari simpan pinjam ini dapat berjalan sesuai ketentuan yang memberikan kemudahan dalam pelayanan pendanaan tanpa syarat agunan, Pemerintah sebaiknya meniadakan jaminan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendanaan. Agar masyarakat mudah untuk mendapatkan pendanaan guna mengembangkan usahanya.
3. Ketentuan Pendanaan, agar ketentuan pendanaan ini tepat pada sasarannya yaitu rumah tangga miskin yang produktif, maka diharapkan pemerintah melakukan

pembinaan pada pelaku PNPM Mandiri agar lebih jeli untuk menyalurkan atau memberikan pinjaman pada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eko, Sutaro. 2004. *Repormasi Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- LAN.2005. *SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia)*.. Jakarta: LAN.
- Mudiyono Dkk. 2005. *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : APMD Press.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- 2009. *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soeharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: Aditama.
- 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2008. *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah.*, Yogyakarta : Lukman Offset.
- Zubaedi, 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media.
- Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, Jakarta : Tim Koordinasi PNPM Mandiri. 2007.
- Pedoman Umum PNPM Mandiri, Jakarta : Tim Koordinasi PNPM Mandiri. 2007.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jenis Usaha Yang Mendapat Bantuan Dana Simpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan Tahun 2009 -----	7
Tabel I.2	Daftar Nama-Nama Anggota SPP Desa Batu Gajah Yang Menunggu -----	9
Tabel I.3	Daftar Nama Kelompok Yang Menerima Dana SPP Di Desa Batu Gajah Pada Tahun 2008 Dan 2009 -----	9
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Pasir Penyut Menurut Jenis Kelamin -----	41
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur Di Desa Batu Gajah	43
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Desa Batu Gajah Menurut Jenis Kelamin --	44
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Desa Batu Gajah-----	45
Tabel IV.5	Jumlah Rumah Ibadah Di Desa Batu Gajah-----	45
Tabel IV.6	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Batu Gajah-----	46
Tabel IV.7	Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Batu Gajah-----	47
Tabel V.1	Tingkat Pendidikan Responden -----	51
Tabel V.2	Lama Responden Menjadi Anggota SPP Desa Batu Gajah----	52
Tabel V.3	Jenis Usaha Responden -----	53
Tabel V.4	Penghasilan Responden Perbulan-----	53
Tabel V.5	Tanggapan Responden Terhadap Tujuan Program SPP Dalam Mengembangkan Potensi Kegiatan Simpan Pinjam Pedesaan	55
Tabel V.6	Tanggapan Responden Tentang Tujuan Program SPP Dalam Memberikan Kemudahan Akses Pendanaan Usaha Skala Mikro	56
Tabel V.7	Tanggapan Responden Tentang Tujuan Program SPP Dalam Mengurangi Rumah Tangga Miskin -----	58
Tabel V.8	Tanggapan Responden Terhadap Tujuan Program SPP Untuk Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Miskin-----	59
Tabel V.9	Tanggapan Responden Tentang Tujuan Program SPP Untuk Mendorong Penguatan Kelembagaan Simpan Pinjam-----	60

Tabel V.10	Tanggapan Responden Tentang Tujuan Program SPP Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Kaum Perempuan -----	61
Tabel V.11	Rekapitulasi Tanggapan responden Tentang Tujuan Program SPP -----	63
Tabel V.12	Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Dasar SPP Untuk Mendapatkan Pelayanan Pendanaan Tanpa Agunan-----	66
Tabel V.13	Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Dasar SPP Dimana Kelompok Memiliki Prosedur Dan Tata Cara Yang Baku-----	67
Tabel V.14	Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Pengelolaan Kegiatan Yang Didasari Oleh Keputusan Yang professional -----	68
Tabel V.15	Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Dasar SPP Yang Berorientasi Pada Peningkatan Pendapatan -----	69
Tabel V.16	Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Pengelolaan Dana Dapat Dipertanggung Jawabkan Kepada Masyarakat -----	70
Tabel V.17	Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat-----	72
Tabel V.18	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Ketentuan Dasar SPP-----	73
Tabel V.19	Tanggapan Responden Terhadap Sasaran Program-----	75
Tabel V.20	Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Dana Pinjaman Sebagai Tambahan Modal Usaha-----	75
Tabel V.21	Tanggapan Responden Terhadap Ketentuan Kelompok Yang Hanya Beranggotakan Kaum Perempuan -----	76
Tabel V.22	Tanggapan Responden Terhadap Ketentuan Kelompok Harus Memiliki Organisasi Kelompok Dan Administrasi Secara Sederhana -----	77
Tabel V.23	Tanggapan Responden Terhadap Ketentuan Kelompok Harus Memiliki Aturan Pengelolaan Dana Simpanan Dan Dana Pinjaman -----	79
Tabel V.24	Tanggapan Responden Terhadap Ketentuan Kelompok Saling Mengenal Satu Sama Lain -----	80
Tabel V.25	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Ketentuan Pendanaan SPP -----	81
Tabel V.26	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan SPP Desa Batu Gajah -----	84

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR IV.2	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batu Gajah	----- 48
-------------	--	----------

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr/i
Anggota SPP Batu Gajah
Di tempat

Dengan hormat,

Semoga Bapak/Ibu/Sdr/I dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak kurang suatu apapun dimana saja berada.

Untuk menyelesaikan studi SI (Strata Satu) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, disyaratkan bagi mahasiswa membuat karya ilmiah yaitu skripsi. Karena itu, Peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr/i sudi memberikan informasi kepada peneliti tentang pelaksanaan PNPM Mandiri khususnya pada kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) di Desa Batu Gajah dengan cara mengisi kuesioner dibawah ini. Bapak/Ibu/Sdr/i dijamin kerahasiaannya sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah.

Atas kerja sama yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan, peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

A. Identitas Peneliti:

Nama : Yulina Arika
NIM : 10675005133
Jurusan : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : SI (Strata Satu)

B. Identitas Responden:

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
Pendidikan Terakhir :
Jenis Usaha :
Pendapatan Perbulan : Rp
Lama Jadi Anggota SPP :

C. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini bersifat ilmiah.
2. Tidak membawa dampak negative kepada siapapun.
3. Jawablah pertanyaan dibawah sesuai dengan kenyataan yang ada.
4. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar dan sesuai.

a. Tujuan Program

1. Sudah sesuaikah tujuan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dalam mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan di Desa Batu Gajah?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang Sesuai
 - e. Belum Sesuai
2. Sudah sesuaikah tujuan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dalam memberikan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro di Desa Batu Gajah?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang Sesuai
 - e. Belum Sesuai
3. Sudah sesuaikah tujuan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dalam mengurangi rumah tangga miskin di Desa Batu Gajah?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang Sesuai
 - e. Belum Sesuai
4. Sudah sesuaikah tujuan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin di Desa Batu Gajah?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
5. Sudah sesuaikah tujuan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dalam mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan di Desa Batu Gajah?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
6. Sudah sesuaikah tujuan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan dalam menciptakan lapangan kerja bagi kaum perempuan di Desa Batu Gajah?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai

b. Ketentuan Dasar

1. Sudah sesuaikah ketentuan dasar dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan, dimana masyarakat miskin mendapatkan pelayanan pendanaan tanpa syarat agunan?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
2. Sudah sesuaikah ketentuan dasar dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan , dimana tiap kelompok mempunyai tata cara dan prosedur yang baku?
 - a. sangat sesuai
 - b. sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang Sesuai
 - e. Belum Sesuai
3. Sudah sesuaikah ketentuan dasar dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan, dimana proses pengelolaan kegiatannya didasari oleh keputusan yang professional?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
4. Sudah sesuaikah ketentuan dasar dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan, dimana kegiatannya berorientasi pada peningkatan pendapatan?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
5. Sudah sesuaikah ketentuan dasar dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan, dimana pengelolaan dananya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
6. Sudah sesuaikah ketentuan dasar dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan, dimana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai

c. Ketentuan Pendanaan

1. Sudah sesuaikah ketentuan pendanaan dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan, dimana sasaran programnya yaitu rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usahanya?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
2. Sudah sesuaikah ketentuan pendanaan dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan, dimana bentuk kegiatannya yang memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal usaha?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
3. Sudah sesuaikah ketentuan pendanaan dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan, dimana tiap kelompok hanya beranggotakan kaum perempuan?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
4. Sudah sesuaikah ketentuan pendanaan dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan, dimana tiap kelompok memiliki organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
5. Sudah sesuaikah ketentuan pendanaan dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan, dimana tiap kelompok memiliki kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai
6. Sudah sesuaikah ketentuan pendanaan dari simpan pinjam untuk kelompok perempuan, dimana tiap anggota kelompok saling mengenal satu sama lain?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Belum sesuai